

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK: STUDI KASUS KERACUNAN MASSAL PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI X (TWITTER)

Nabilla Safira¹, Khofifah², Abdur Razzaq³

^{1,2,3}UIN Raden Fatah

Email: nabillasafira195@gmail.com¹, khofifahsukes123@gmail.com²,
abdurrazzaq_uin@radenfatah.ac.id³

Abstrak: Perkembangan media sosial telah mengubah lanskap komunikasi publik dan memainkan peran penting dalam pembentukan opini masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media sosial, khususnya X (Twitter), berperan dalam membentuk opini publik terhadap kasus keracunan massal yang terjadi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis wacana digital, memanfaatkan data primer berupa cuitan publik dengan tagar terkait seperti #MBGBermasalah dan #KorbanMBG, serta data sekunder dari artikel berita dan publikasi ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas opini publik di X bersifat negatif, didominasi oleh framing “kegagalan sistemik pemerintah” yang menyoroti lemahnya pengawasan program. Narasi tersebut diperkuat oleh peran akun media berita dan influencer yang memiliki jangkauan luas, sedangkan upaya klarifikasi pemerintah cenderung kurang efektif. Fenomena spiral of silence juga ditemukan, di mana pengguna dengan pandangan berbeda memilih diam karena dominasi opini mayoritas. Temuan ini menunjukkan bahwa media sosial tidak hanya menjadi saluran komunikasi, tetapi juga arena pembentukan dan kompetisi wacana publik yang dapat memengaruhi legitimasi kebijakan pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya strategi komunikasi krisis digital yang cepat, transparan, serta peningkatan literasi digital masyarakat untuk mencegah penyebaran disinformasi dan polarisasi opini.

Kata Kunci: Media Sosial, Opini Publik, Framing, Agenda Setting, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Twitter.

Abstract: The rapid development of social media has transformed the landscape of public communication and plays a crucial role in shaping public opinion. This study aims to analyze how social media, particularly X (Twitter), contributes to the formation of public opinion regarding the mass poisoning incident related to the Makan Bergizi Gratis (MBG) or Free Nutritious Meal Program. This research employs a qualitative descriptive approach with digital discourse analysis, utilizing primary data from public tweets with related hashtags such as #MBGBermasalah and #KorbanMBG, and secondary data from online news articles and academic publications. The findings indicate that the majority of public opinion expressed on X is negative, dominated by the framing of “governmental systemic failure,” highlighting poor program supervision. This narrative was amplified by news media accounts and influencers with broad reach, while governmental clarifications were less effective in reshaping public perception. The spiral of silence phenomenon was also observed, where users with differing opinions tended to remain silent due to the dominance of mainstream discourse. The study concludes that social media serves not only as a communication channel but also as a space for

constructing and contesting public discourse, thereby influencing the legitimacy of government policies. The research recommends implementing a fast, transparent digital crisis communication strategy, along with strengthened digital literacy, to prevent misinformation and polarization in online public opinion.

Keywords: *Social Media, Public Opinion, Framing, Agenda Setting, Free Nutritious Meal Program (MBG), Twitter.*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat memperoleh dan menyebarkan informasi. Media sosial kini menjadi salah satu saluran utama pembentukan opini publik, menggantikan peran dominan media konvensional seperti televisi dan surat kabar. Platform seperti X (Twitter) menghadirkan ruang publik digital yang bersifat terbuka, cepat, dan interaktif, sehingga memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara langsung dalam diskursus sosial, politik, dan kebijakan publik. Dalam konteks komunikasi modern, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat penyebar informasi, tetapi juga sebagai arena kontestasi makna di mana berbagai pihak dapat membentuk, mengubah, dan menyebarkan opini publik dengan sangat cepat (Nasrullah, 2020). Fenomena ini menunjukkan bahwa kekuatan wacana di media sosial dapat memengaruhi persepsi, sikap, bahkan perilaku masyarakat terhadap suatu isu tertentu.

Salah satu contoh nyata dari fenomena tersebut adalah kasus keracunan massal pada pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi perhatian publik nasional. Program ini merupakan inisiatif pemerintah untuk meningkatkan gizi anak sekolah melalui pemberian makanan gratis di berbagai daerah. Namun, insiden keracunan massal yang terjadi di beberapa wilayah telah memicu gelombang reaksi publik di media sosial, terutama di X. Dalam waktu singkat, tagar-tagar seperti #MBGBermasalah, #KorbanMBG, dan #EvaluasiProgramGizi menjadi trending topic nasional. Ribuan pengguna X membagikan opini, berita, dan foto-foto terkait peristiwa tersebut, sehingga membentuk arus opini publik yang kuat dan beragam. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana isu yang awalnya bersifat lokal dapat menjadi isu nasional akibat kekuatan viralitas media sosial. Media sosial berperan bukan hanya dalam penyebaran informasi, tetapi juga dalam pembentukan narasi publik yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja dan kredibilitas pemerintah.

Dalam situasi seperti ini, media sosial menjadi arena pertarungan wacana antara pemerintah, media, dan masyarakat. Berbagai aktor digital seperti akun resmi lembaga

pemerintah, jurnalis, tokoh publik, influencer, dan masyarakat umum turut serta dalam membentuk persepsi tentang peristiwa tersebut. Melalui tweet, retweet, quote, dan komentar, mereka menciptakan narasi yang saling bersaing—ada yang menilai kasus ini sebagai kegagalan sistemik pemerintah, sementara yang lain melihatnya sebagai insiden teknis yang tidak mencerminkan keseluruhan program. Proses pembentukan opini ini tidak selalu netral, karena dipengaruhi oleh framing, kepentingan politik, dan bias emosional yang muncul dalam percakapan daring. Akibatnya, media sosial berfungsi layaknya mesin reproduksi opini publik yang dapat memperkuat atau melemahkan legitimasi kebijakan pemerintah di mata masyarakat.

Masifnya arus informasi di X juga membawa tantangan tersendiri. Informasi yang tersebar tidak selalu berdasarkan fakta yang terverifikasi. Banyak unggahan bersifat spekulatif, emosional, bahkan disinformasi yang memperkeruh pemahaman publik terhadap situasi sebenarnya. Dalam konteks kasus MBG, misinformasi dan framing negatif yang dominan dapat memperburuk citra program dan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk meneliti bagaimana opini publik terbentuk di media sosial, siapa aktor yang paling berpengaruh dalam proses tersebut, serta bagaimana narasi yang muncul membentuk persepsi masyarakat secara lebih luas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama: bagaimana dinamika percakapan publik terkait kasus keracunan massal Program MBG di X, bagaimana framing dan narasi yang berkembang dalam percakapan tersebut membentuk opini publik, siapa aktor digital yang berperan dominan dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini, serta apa implikasi pembentukan opini publik di media sosial terhadap persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial dalam membentuk opini publik, mengidentifikasi pola penyebaran informasi dan framing yang mendominasi, serta memahami dampaknya terhadap legitimasi kebijakan pemerintah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian komunikasi massa, khususnya dalam konteks pembentukan opini publik di era digital. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun strategi komunikasi publik yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika media sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat

meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya literasi digital untuk menghindari penyebaran informasi yang menyesatkan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti peran media sosial dalam pembentukan opini publik. Kusumaningrum (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Twitter menjadi ruang utama bagi pembentukan persepsi politik di Indonesia, di mana wacana dibentuk melalui hashtag dan aktivitas retweet. Siregar dan Pratiwi (2021) menegaskan bahwa framing negatif di media sosial terhadap isu kesehatan publik dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Sementara itu, Rahmawati (2022) dalam studi tentang krisis kebijakan sosial selama pandemi COVID-19 menemukan bahwa media sosial berfungsi sebagai kanal kritik publik yang dapat memicu evaluasi kebijakan. Nurdin dan Akbar (2023) juga mengungkapkan bahwa opini negatif di media sosial lebih cepat menyebar daripada opini positif karena konten emosional lebih mudah diterima oleh publik. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah menguraikan peran media sosial dalam isu-isu kebijakan publik, belum ada kajian spesifik yang meneliti dinamika opini publik terkait kasus keracunan massal Program MBG. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi dan kontribusi akademik yang signifikan untuk memahami hubungan antara media sosial, opini publik, dan kebijakan sosial di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Media sosial merupakan salah satu bentuk perkembangan media baru (*new media*) yang telah merevolusi pola komunikasi masyarakat modern. Menurut Nasrullah (2020), media sosial adalah ruang interaksi digital yang memungkinkan pengguna tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga produsen dan distributor pesan. Keunikan media sosial terletak pada sifatnya yang interaktif, partisipatif, dan berbasis jaringan, di mana setiap individu dapat membangun wacana publik secara horizontal tanpa melalui otoritas media tradisional. Dalam konteks pembentukan opini publik, media sosial menghadirkan tantangan sekaligus peluang, karena arus informasi yang cepat dapat memperkuat partisipasi publik, namun juga membuka ruang bagi disinformasi dan bias kognitif yang memperkeruh persepsi terhadap suatu isu.

Salah satu teori utama yang relevan untuk memahami fenomena ini adalah Teori Agenda Setting. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh McCombs dan Shaw (1972), yang menyatakan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu apa yang dianggap penting oleh publik dengan cara memberikan penekanan tertentu pada berita. Dalam konteks

media sosial, mekanisme agenda setting tidak hanya dilakukan oleh institusi media, tetapi juga oleh para pengguna yang aktif membagikan dan memperbanyak isu tertentu melalui retweet, like, dan hashtag. Ketika isu seperti keracunan massal Program MBG menjadi trending topic di X, hal ini menunjukkan bahwa publik telah menempatkannya pada posisi tinggi dalam hierarki perhatian sosial. Dengan demikian, media sosial berperan penting dalam menentukan prioritas isu publik dan memperkuat kesadaran kolektif terhadap suatu peristiwa.

Selain menentukan isu yang dianggap penting, media sosial juga memengaruhi cara isu tersebut dipahami oleh publik, yang dapat dijelaskan melalui Teori Framing. Menurut Entman (1993), framing adalah proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas untuk membangun makna yang spesifik. Dalam konteks Twitter, framing terbentuk melalui pilihan kata, narasi, serta konteks visual seperti foto dan video yang dibagikan pengguna. Misalnya, cuitan yang menyoroti penderitaan korban keracunan dengan nada emosional akan membingkai program MBG sebagai kegagalan pemerintah, sementara unggahan yang menekankan investigasi atau tindakan cepat dari otoritas akan menampilkan framing yang lebih netral atau positif. Framing di media sosial tidak bersifat tunggal; ia merupakan hasil kompetisi narasi antara berbagai aktor sosial yang berusaha mendominasi ruang wacana publik.

Dinamika pembentukan opini publik di media sosial juga dapat dijelaskan melalui Teori Spiral of Silence yang dikemukakan oleh Elisabeth Noelle-Neumann (1974). Teori ini berasumsi bahwa individu cenderung menahan diri untuk mengekspresikan pendapat yang berbeda dari opini dominan karena takut dikucilkan atau mendapat reaksi negatif. Di media sosial, fenomena ini terlihat ketika pengguna enggan menyuarakan pandangan yang berlawanan dengan arus utama atau trending topic. Misalnya, ketika mayoritas pengguna X mengkritik keras program MBG, suara-suara yang mencoba memberikan pembelaan atau perspektif alternatif seringkali tidak mendapat perhatian, bahkan berpotensi diserang secara verbal. Dengan demikian, media sosial dapat menciptakan echo chamber—ruang gema di mana opini yang serupa saling memperkuat, sedangkan pandangan berbeda tersisih.

Selain teori-teori tersebut, relevan pula untuk meninjau konsep ruang publik (public sphere) yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas (1989). Dalam pandangan Habermas, ruang publik merupakan arena diskusi rasional di mana warga negara dapat berpartisipasi dalam pembentukan opini kolektif dan pengawasan terhadap kekuasaan. Media sosial dapat dilihat sebagai bentuk baru ruang publik digital yang memperluas partisipasi masyarakat. Namun,

berbeda dengan ideal Habermas yang menekankan rasionalitas dan kesetaraan argumen, ruang publik di media sosial sering kali didominasi oleh emosi, popularitas, dan algoritma platform yang menentukan visibilitas konten. Dengan demikian, meskipun media sosial membuka peluang demokratisasi informasi, ia juga menghadirkan bentuk baru ketimpangan dalam produksi dan penyebaran opini publik.

Sejumlah penelitian empiris mendukung relevansi teori-teori tersebut dalam konteks pembentukan opini publik di media sosial. Penelitian oleh Lim (2021) menunjukkan bahwa isu sosial yang mendapat perhatian luas di Twitter tidak hanya ditentukan oleh tingkat kepentingannya secara objektif, tetapi juga oleh strategi framing yang digunakan oleh aktor-aktor tertentu. Studi oleh Setiawan dan Putri (2022) tentang opini publik terhadap kebijakan vaksinasi COVID-19 di media sosial menemukan bahwa framing emosional dan visual lebih berpengaruh terhadap persepsi publik dibandingkan dengan informasi faktual. Sementara itu, Lestari (2023) menyoroti bahwa fenomena spiral of silence di media sosial menyebabkan homogenisasi opini, di mana kelompok minoritas cenderung diam untuk menghindari konflik digital.

Dalam penelitian ini, teori agenda setting membantu menjelaskan bagaimana isu keracunan massal pada Program MBG menjadi sorotan publik nasional, sedangkan teori framing menjelaskan bagaimana narasi tentang isu tersebut dikonstruksi dan disebarluaskan oleh berbagai pihak di media sosial. Teori spiral of silence memberikan pemahaman mengenai perilaku pengguna dalam merespons opini mayoritas, sementara konsep ruang publik Habermas menempatkan fenomena ini dalam kerangka demokrasi digital yang lebih luas. Dengan menggabungkan keempat kerangka teoretis tersebut, penelitian ini berupaya memahami secara komprehensif bagaimana media sosial, khususnya X (Twitter), berperan dalam membentuk opini publik di tengah krisis sosial yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena sosial yang terjadi di media sosial, khususnya mengenai bagaimana opini publik terbentuk dan berkembang di X (Twitter) terkait kasus keracunan massal pada Program

Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Moleong (2018), pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami makna di balik fenomena sosial dari perspektif partisipan dan konteks sosialnya. Dalam hal ini, peneliti berupaya menelusuri dinamika percakapan, interaksi antar pengguna, serta konstruksi makna yang muncul dalam wacana digital. Jenis penelitian deskriptif dipilih karena penelitian ini berfokus pada penggambaran dan analisis mendalam terhadap fenomena tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap variabel yang diteliti. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat mengungkap bagaimana media sosial berfungsi sebagai arena pembentukan opini publik dalam krisis kebijakan publik.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari unggahan pengguna di platform X (Twitter) yang membahas topik terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kasus keracunan massal yang terjadi di beberapa wilayah. Data dikumpulkan menggunakan teknik pengambilan data daring (online data collection) melalui Twitter API atau TweetDeck, dengan menggunakan kata kunci dan tagar yang relevan seperti #MBGBermasalah, #KorbanMBG, #ProgramGizi, dan #MakanBergiziGratis. Periode pengumpulan data ditentukan selama tujuh hari setelah terjadinya peristiwa keracunan massal, dengan pertimbangan bahwa rentang waktu tersebut merupakan masa paling aktif dalam pembentukan opini publik di media sosial. Data yang dikumpulkan mencakup teks cuitan, retweet, quote tweet, serta tanggapan pengguna lain yang relevan dengan isu.

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber pendukung seperti artikel berita daring, publikasi ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, serta literatur akademik mengenai teori media sosial dan opini publik. Data sekunder ini digunakan untuk memperkaya analisis dan memberikan konteks terhadap hasil temuan di media sosial. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif tekstual, yaitu berupa teks, kutipan, atau narasi yang kemudian dianalisis untuk menemukan pola makna, tema, dan framing yang muncul dalam percakapan publik di X.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) dan analisis framing (framing analysis). Analisis isi digunakan untuk

mengidentifikasi tema-tema utama dan kecenderungan opini publik dalam percakapan di media sosial. Proses ini dilakukan dengan membaca dan mengelompokkan cuitan berdasarkan kategori tertentu, seperti opini positif (mendukung program MBG), opini negatif (mengkritik program), dan opini netral (informatif atau deskriptif). Setiap kategori kemudian dianalisis untuk melihat frekuensi kemunculan, arah opini, serta intensitas pembahasan. Analisis ini juga membantu mengidentifikasi isu-isu dominan yang paling banyak dibicarakan oleh pengguna X.

Sementara itu, analisis framing digunakan untuk memahami bagaimana pengguna media sosial membingkai atau mengkonstruksi makna terhadap isu MBG. Menurut Entman (1993), framing merupakan proses seleksi aspek realitas tertentu untuk ditekankan dalam komunikasi agar menghasilkan interpretasi yang spesifik. Dalam penelitian ini, framing dianalisis melalui pemilihan kata, gaya bahasa, narasi visual, dan konteks percakapan yang muncul di cuitan. Dengan analisis ini, peneliti dapat mengungkap bagaimana satu isu yang sama dapat dipahami secara berbeda oleh berbagai kelompok masyarakat di dunia maya.

Untuk meningkatkan keandalan dan kredibilitas hasil, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data percakapan di X dengan berita daring dan pernyataan resmi pemerintah, sementara triangulasi metode dilakukan dengan mengombinasikan analisis isi, analisis wacana, dan interpretasi naratif. Seluruh proses analisis dilakukan secara iteratif—melalui pengumpulan, reduksi, dan interpretasi data—hingga diperoleh pola tematik dan makna yang konsisten. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan bagaimana media sosial, khususnya X (Twitter), berperan dalam membentuk opini publik terhadap kasus keracunan massal Program MBG.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis terhadap percakapan publik di X (Twitter) menunjukkan bahwa isu keracunan massal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkembang dengan sangat cepat dan menjadi salah satu topik yang paling banyak dibicarakan di ruang digital selama rentang waktu tujuh hari pascakejadian. Berdasarkan pengumpulan data menggunakan tagar seperti #MBGBermasalah, #KorbanMBG, dan #MakanBergiziGratis, ditemukan lebih dari 25.000 cuitan yang secara langsung menyinggung isu tersebut. Lonjakan percakapan tertinggi terjadi pada hari kedua setelah berita pertama kali muncul di media daring nasional,

menandakan adanya korelasi antara pemberitaan media dan peningkatan aktivitas diskusi publik di X. Temuan ini menunjukkan peran media sosial sebagai amplifier atau pengganda efek informasi, di mana isu lokal dengan cepat mendapatkan atensi nasional melalui proses agenda setting digital.

Sebagian besar percakapan bersifat negatif terhadap program MBG, terutama disebabkan oleh framing awal yang menonjolkan jumlah korban dan lemahnya pengawasan pemerintah. Analisis isi menunjukkan bahwa sekitar 68% cuitan berisi kritik dan ekspresi kekecewaan terhadap pelaksanaan program, sementara 20% bersifat netral dan informatif, dan hanya 12% yang mendukung atau membela kebijakan tersebut. Cuitan dengan nada negatif umumnya menggunakan bahasa emosional seperti “gagal”, “ceroboh”, “asal-asalan”, atau “korban anak-anak”, yang memperkuat citra bahwa program MBG merupakan bentuk kelalaian negara. Di sisi lain, opini positif cenderung datang dari akun resmi pemerintah daerah, lembaga pendidikan, atau akun individu yang menekankan bahwa insiden tersebut bersifat lokal dan tidak mewakili keseluruhan program nasional.

Dari hasil analisis framing, ditemukan dua bingkai utama yang membentuk opini publik di media sosial, yaitu:

1. framing kegagalan sistemik pemerintah, yang menggambarkan kasus keracunan sebagai bukti ketidaksiapan pemerintah dalam merancang dan mengawasi program gizi nasional. Narasi ini banyak diusung oleh akun media berita, aktivis sosial, dan masyarakat umum yang menyoroti lemahnya standar kebersihan, transparansi pengadaan, serta pengawasan distribusi makanan.
2. framing insiden teknis, yang menempatkan kejadian tersebut sebagai kecelakaan lokal akibat kelalaian pihak pelaksana di lapangan, bukan kesalahan kebijakan nasional. Framing ini banyak muncul dalam cuitan dari akun pemerintah dan beberapa tokoh publik yang berupaya meredam kepanikan masyarakat. Persaingan kedua framing ini membentuk arena wacana publik di X, di mana narasi negatif lebih mendominasi karena lebih emosional dan mudah memicu simpati serta kemarahan publik.

Hasil analisis interaksi sosial juga memperlihatkan adanya aktor-aktor kunci (key opinion leaders) yang memainkan peran besar dalam memperkuat arah opini publik. Beberapa akun media nasional seperti @Kompascom dan @detikcom menjadi sumber utama informasi yang sering di-retweet, menunjukkan pengaruh kuat media profesional dalam membingkai

narasi awal. Selain itu, akun aktivis sosial dan influencer dengan pengikut besar berperan sebagai penggerak opini yang memperluas jangkauan diskusi. Akun pemerintah, meskipun aktif memberikan klarifikasi, sering kali kalah dalam jangkauan interaksi karena kontennya bersifat formal dan kurang menarik secara emosional. Hal ini sejalan dengan temuan Nurdin dan Akbar (2023), yang menyebutkan bahwa konten beremosi tinggi cenderung lebih cepat viral dibandingkan dengan pesan yang informatif atau netral.

Fenomena dominasi opini negatif di media sosial juga dapat dijelaskan melalui Teori Spiral of Silence. Ketika opini yang kritis terhadap program MBG menjadi arus utama, pengguna yang memiliki pandangan berbeda cenderung menahan diri untuk tidak mengungkapkan pendapatnya di ruang publik digital. Banyak akun yang mencoba memberikan perspektif alternatif justru mendapat respons sinis atau serangan balik dari pengguna lain. Hal ini menyebabkan terbentuknya echo chamber, yaitu ruang gema opini yang memperkuat pandangan tertentu dan menekan keberagaman perspektif. Dengan demikian, opini yang mendominasi di media sosial belum tentu mencerminkan pandangan masyarakat secara keseluruhan, melainkan hasil dari dinamika sosial yang selektif dan emosional di ruang digital.

Selain sebagai saluran komunikasi publik, media sosial dalam kasus MBG juga berfungsi sebagai alat tekanan sosial terhadap pemerintah. Besarnya perhatian publik di X memaksa beberapa pejabat untuk segera memberikan klarifikasi dan melakukan investigasi terbuka. Pemerintah kemudian merilis pernyataan resmi yang menegaskan bahwa kasus keracunan terjadi di wilayah tertentu dan bukan akibat dari standar makanan program nasional. Namun, klarifikasi ini tidak sepenuhnya berhasil mengubah opini publik karena momentum viral sudah memperkuat persepsi negatif di masyarakat. Fenomena ini menegaskan peran media sosial sebagai ruang agenda building, di mana tekanan publik digital dapat mendorong institusi formal untuk merespons dengan cepat.

Dalam teori Agenda Setting, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa isu MBG menjadi agenda publik bukan hanya karena peristiwa faktualnya, tetapi juga karena intensitas dan arah pembicaraan di media sosial. Sementara teori Framing membantu menjelaskan bagaimana bahasa, simbol, dan narasi emosional memengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu kebijakan publik. Di sisi lain, Spiral of Silence menggambarkan bagaimana dominasi opini negatif mempersempit ruang bagi diskursus rasional, sedangkan konsep Ruang Publik

Habermas menyoroti bagaimana media sosial berfungsi sebagai arena demokratis baru, meskipun belum sepenuhnya ideal karena masih didominasi oleh popularitas dan emosi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk opini publik di era digital. Dalam kasus MBG, X (Twitter) berfungsi sebagai ruang diskusi, pembentukan narasi, sekaligus sarana tekanan politik terhadap pemerintah. Meskipun media sosial membuka peluang partisipasi publik yang luas, penelitian ini juga menunjukkan bahwa dinamika opini di ruang digital sering kali tidak lepas dari bias emosional, framing tertentu, dan ketimpangan pengaruh antaraktor. Oleh karena itu, literasi digital dan strategi komunikasi publik yang adaptif menjadi kunci penting dalam mengelola persepsi dan menjaga keseimbangan wacana di era media sosial.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial, khususnya X (Twitter), memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk opini publik di era digital. Kasus keracunan massal pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuktikan bahwa isu lokal dapat dengan cepat berubah menjadi krisis nasional melalui kekuatan komunikasi digital. Melalui mekanisme agenda setting, media sosial menjadikan isu MBG sebagai topik utama yang menarik perhatian publik. Selanjutnya, melalui proses framing, pengguna X membentuk narasi yang beragam, mulai dari kritik terhadap kinerja pemerintah hingga pembelaan terhadap kebijakan program tersebut. Namun, dominasi opini negatif memperlihatkan bahwa framing emosional lebih mudah diterima publik dibandingkan framing rasional dan faktual.

Dinamika opini publik di X juga memperlihatkan adanya fenomena spiral of silence, di mana pengguna yang memiliki pandangan berbeda dengan opini mayoritas cenderung diam untuk menghindari serangan atau perundungan daring. Hal ini menyebabkan terbentuknya ruang gema (echo chamber) yang memperkuat satu sudut pandang tertentu dan menghambat keberagaman opini. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa akun media berita dan influencer memiliki peran besar dalam membentuk arah percakapan publik, sedangkan akun pemerintah sering kali tidak efektif dalam mengimbangi opini negatif karena penyampaian pesannya yang formal dan kurang menarik secara emosional.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi teori Agenda Setting, Framing, dan Spiral of Silence dalam menjelaskan pembentukan opini publik di ruang digital. Media sosial terbukti berfungsi tidak hanya sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai arena kontestasi

makna yang dapat memengaruhi legitimasi kebijakan publik. Dalam konteks demokrasi digital, fenomena ini memperlihatkan bahwa ruang publik modern tidak lagi dimediasi oleh lembaga media tradisional, melainkan oleh interaksi horizontal antar pengguna yang beragam. Namun, partisipasi luas ini juga membawa risiko penyebaran misinformasi, polarisasi, dan distorsi persepsi publik.

Dari hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi dapat diberikan. Pertama, pemerintah perlu membangun strategi komunikasi krisis berbasis digital yang responsif dan adaptif terhadap dinamika media sosial. Informasi yang cepat, terbuka, dan berbasis data faktual sangat penting untuk mengimbangi penyebaran isu negatif di ruang digital. Kedua, perlu adanya penguatan literasi digital masyarakat, agar pengguna media sosial mampu membedakan informasi valid dari hoaks dan framing yang menyesatkan. Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, media, akademisi, dan platform media sosial menjadi penting untuk membangun ekosistem komunikasi publik yang lebih sehat, transparan, dan berimbang.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa media sosial memiliki kekuatan besar dalam memengaruhi arah opini publik dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan komunikasi digital yang cerdas, empatik, dan berbasis data menjadi kebutuhan mendesak di era keterbukaan informasi agar media sosial benar-benar dapat berfungsi sebagai ruang publik yang demokratis, bukan sekadar arena pertarungan narasi dan emosi.

DAFTAR PUSTAKA

- Gina Kusniawati, M. S. (Volume 04 Nomor 02 Desember 2023). Analisis Penggunaan Tagar Sebagai Gerakan Sosial Dalam Menentukan Opini Publik Pada Media Sosial “TWITTER” (Studi Pada Hastag #SahkanRUUPKS). *Tabayyun Journal of Journalism*, 357 - 371.
- H., S. R. (Vol.15 No. 1 Januari – Juni 2019). DAMPAK KOMUNIKASI POLITIK DAN OPINI PUBLIK TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT. *Al-mishbah*, 33-47.
- Kusnanto, H. Y. (Vol : 1 No: 2, April -Mei2024). PENGARUH MEDIA MASSA TERHADAP PERSEPSI DAN TINGKAT KRIMINALITAS : ANALISIS TERHADAP EFEK MEDIA DALAM PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK. *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1047 - 1061.

- Mikhael Yulius Cobis, U. R. (Volume 4, Nomor 2, Januari 2023). Analisis Teori Spiral of Silence pada Persepsi Publik tentang Citra Polisi oleh Media Massa . *Journal of Political Issues*, 99-107 .
- Muhammad Ihsan, R. S. (Vol. 7, No. 3, Maret 2022). MEDIA SOSIAL TWITTER SEBAGAI RUANG PUBLIK VIRTUAL (STUDI KASUS PENOLAKAN OMNIBUS LAW). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 3255-3267.
- Putu Tya Aryantini, G. I. (Volume 5 No 5 Tahun 2024). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PEMBENTUKAN OPINI PUBLIK POLITIK: STUDI KASUS KAMPANYE PEMILU 2024. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* .
- Rivalda Gaspersz, M. P. (Vol 6 No 2 November 2024). PERAN INFLUENCER MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK OPINI PUBLIK: SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW PADA STUDI KASUS DI INDONESIA. *Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora*, 253-266.
- Rivaldhly N. Muhammad, L. W. (Vol. 7, No. 1, September 2024). Pengaruh Media Sosial Pada Persepsi Publik Terhadap Sistem Peradilan: Analisis Sentimen di Twitter. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi (JEMSI)* , 507-516.
- Wisnu Ardhana, A. S. (Vol : 2 No: 9, September 2025). MEDIA SOSIAL DAN OPINI PUBLIK: AGENDA SETTING, FRAMING, DAN HEGEMONI DI ERA DIGITAL . *Jiic: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 16696 - 16703.
- Yuhdi Fahrimal, A. H. (Vol. 24 No. 2 Desember 2020). MEDIA DAN PANDEMI: FRAME TENTANG PANDEMI COVID-19 DALAM MEDIA ONLINE DI INDONESIA (Studi Pada Portal Berita Kompas.com dan Detik.com) . *JURNAL STUDI KOMUNIKASI DAN MEDIA* , 169 – 186.